

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Selain itu, perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya. Hal tersebut dikarenakan *steward* berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Teori *stewardship* didesain untuk para peneliti guna menguji situasi dimana para pelaku dalam organisasi sebagai *steward* dapat termotivasi untuk melakukan tindakan dengan cara terbaik kepada *principal*.

Dalam pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai *steward* dan rakyat sebagai pemiliknya. Sehingga, pemerintah selaku *steward* akan berusaha bekerja untuk kepentingan bersama, karena *steward* merasa memiliki kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional. Hal tersebut dikarenakan *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan pemilik (kepentingan rakyat).

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil juga manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan strategi.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara keseluruhan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategi (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam

melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001) menyatakan kejelasan sasaran anggaran merupakan arah dan kebijakan umum APBD yang pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai oleh daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Emilia (2013), kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, serta dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah di masa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestone*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung-jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan mengurangi senjangan anggaran pemerintah daerah (Suhartono dan Solichin 2006).

Fungsi dari sasaran anggaran yang jelas adalah mempermudah pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan mempersulit pelaksanaan anggaran.

Tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut:

- a. Spesifik, yaitu sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas.
- b. Terukur, yaitu sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
- c. Menantang tetapi realistis, yaitu sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

- d. Berorientasi pada hasil akhir, yaitu sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
- e. Memiliki batas waktu, yaitu sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai (Abdullah 2004 dalam Laely, N.M 2016).

4. Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 1) Keandalan pelaporan keuangan, 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Unsur dalam pengendalian internal meliputi : 1) lingkungan pengendalian, 2) penaksiran risiko, 3) informasi dan komunikasi, 4) aktivitas pengendalian, dan 5) pemantauan.

Pengendalian internal merupakan alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektasian penggelapan/fraud (Rahman 2012 dalam Afrina 2015).

5. Sistem Pelaporan

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik merupakan suatu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan sektor publik berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir dari sektor publik itu sendiri.

Menurut Bastian (2010) mendefinisikan pelaporan kinerja sebagai cerminan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan manifestasi dari proses kinerja berbasis akuntabilitas. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada setiap periode. Laporan keuangan pada suatu instansi pemerintah merupakan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut.

Mardiasmo (2009) menyatakan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

- a. Kepatuhan dan Pengelolaan, laporan keuangan diberikan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

- b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan ini digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- c. Perencanaan dan Informasi otorisasi, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- d. Kelangsungan Organisasi, laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa mendatang.
- e. Hubungan masyarakat, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan prestasi yang telah dicapai kepada para pemakai atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- f. Sumber fakta dan gambaran, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD harus disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang mengkaji mengenai kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Primayoni (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kalungkung	Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektivitas Pengendalian Internal Dependen : Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan sasaran anggaran, Efektivitas pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.	Setiawan (2013)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dan Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Afrina (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sitem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru	Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sitem Pelaporan Dependen : Akuntabilitas Kinerja	Variabel penerapan sistem akuntansi, pengendalian intern, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabillitas kinerja intansi pemerintah

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
4.	Wahdatul (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.	Independen: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.	Heptariani (2013)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau)	Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, dan Sistem Pelaporan Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan sasaran anggaran dan budaya organisasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
6.	Cahyani & Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja	Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
7.	Darwanis, dkk (2017)	<i>The Effect Of Reporting System and Clarity Of Budget Target On Accountability Based Performance Of Governmental Agencies (Study On Aceh Government Work Units, Aceh Province, Indonesia</i>	Independen: <i>Reporting System dan Clarity Of Budget Target</i> Dependen: <i>Accountability Based Performance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja, sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dan kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
8.	Susilowati & Nur (2015)	<i>An investigation of The Effect of Accounting Controls, Budget Goal Clarity, Mental Model Implementation on Accountability of Government Performance</i>	Independen : <i>Accounting controls, budget goal clarity, dan mental model</i> Dependen: <i>Accountability of Government Performance</i>	Pengendalian Akuntansi, Kejelasan sasaran anggaran, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Model mental tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

C. Kerangka Pemikiran

Pemerintah dalam rangka memenuhi akuntabilitas harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan. Anggaran yang jelas dapat membantu para manajer (Kepala Badan) dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung-jawab terhadap

penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan mengurangi kesenjangan anggaran pemerintah daerah, sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami kenaikan (Suhartono dan Solichin, 2006). Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah atau *steward* akan mengalokasikan dananya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan oleh *principal* (rakyat).

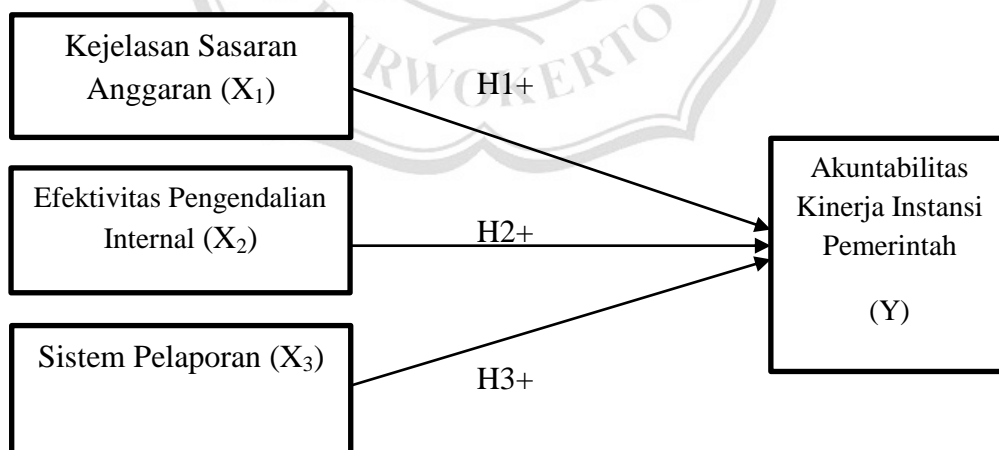
Pengendalian merupakan hal yang penting dalam manajemen yang baik, yang menunjang dalam mewujudkan akuntabilitas. Penggunaan pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja (Primayoni, 2014). Dalam teori *stewardship*, *steward* (pemerintah) akan meningkatkan pengendalian internalnya sehingga kepercayaan *principal* (rakyat) atas kinerja *steward* (pemerintah) meningkat dan dapat terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Begitu pula sistem pelaporan yang baik, diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar laporan keuangan dapat mewujudkan

informasi akuntansi bagi para pemakainya dan dapat memenuhi suatu tujuan maka laporan keuangan harus memenuhi kualitas relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan demikian, pemerintah akan melaporkan kinerjanya secara detail sehingga menghasilkan data-data laporan keuangan yang berkualitas dan dapat terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Berdasarkan teori *stewardship*, *steward* atau pemerintah akan melakukan penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan dana publik guna menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel kepada *principal* (rakyat).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya (Suhartono dan Solichin, 2006). Ketidakjelasan dalam sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, sehingga berdampak pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Hady, 2017).

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Heptariani (2013) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang pertama yaitu:

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/fraud. Pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan (intern) maka, akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta berpotensi dalam mengarahkan sebuah instansi pada pencapaian kinerja yang optimal atas pengendalian yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.

Pengendalian internal yang efektif dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tresnawati (2012) dan Primayoni (2014) menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂ : Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Afrina, 2015). Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahdatul (2016), dan Cahyani & Utama (2015). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃ : Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

